



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227  
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330  
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 23/KP.03/IX/2024

**TENTANG  
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melakukan pendaftaran online di SSCASN 2024;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI/Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**B. Dokumen Persyaratan**

1. Dokumen persyaratan terdiri dari:
  - a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan Pas Foto terbaru Pakaian Formal;
  - b. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan dari Dukcapil;

- c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - d. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - e. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, format surat lamaran dapat diunduh pada lampiran II pengumuman ini;
  - f. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai, format surat pernyataan dapat diunduh pada lampiran III pengumuman ini;
  - g. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar, format surat dapat diunduh pada lampiran IV pengumuman ini;
  - h. Surat keterangan aktif bekerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus, format surat dapat diunduh pada lampiran V pengumuman ini;
2. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format **PDF** dilakukan pada:
    - a. Tanggal 1 Oktober 2024 s.d 20 Oktober 2024 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> bagi pelamar prioritas (tenaga non ASN) yang terdata dalam pangkalan data (Database BKN);
    - b. Tanggal 17 November 2024 s.d 1 Desember 2024 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> bagi pelamar tenaga non ASN yang bekerja pada lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  3. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah **scan berkas asli berwarna** (bukan format scan hitam putih);
  4. Pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;

### C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal:
  - a. Tanggal 1 Oktober 2024 s.d 20 Oktober 2024 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> bagi pelamar prioritas (tenaga non ASN) yang terdata dalam pangkalan data (Database BKN);
  - b. Tanggal 17 November 2024 s.d 1 Desember 2024 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> bagi pelamar tenaga non ASN yang bekerja pada lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
3. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.

#### D. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK T.A 2024 bagi pelamar prioritas (tenaga non ASN) yang terdata dalam pangkalan data (Database BKN):

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s.d 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK T.A 2024 pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

## E. Tahapan Seleksi

1. Tahapan Seleksi
  - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - b. Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
  - c. Seleksi Kompetensi memuat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
2. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.

## F. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman: <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil *Computer Assisted Test* (CAT) yang memuat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dengan memperhatikan jenis formasi yang sama;
3. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

## G. Lain-Lain

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website resmi Seleksi Komnas HAM (<https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK>);
2. Untuk dokumen yang menggunakan meterai 10.000, setiap 1 (satu) meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen;
3. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, namun cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-meterai;
4. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
5. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
6. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
7. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Jika dalam mengikuti tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbukti peserta seleksi melanggar aturan dan ketentuan maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan kepesertaan yang bersangkutan;

11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
14. Semua pelamar disarankan dapat mengakses dan mempelajari bahan pada tautan <https://www.komnasham.go.id/>, dan untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.komnasham.go.id/seleksiPPPK/>. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Call Center : Telepon 021-23599034 pada hari Senin s.d. Jumat Pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB (selama masa seleksi berlangsung).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2024  
Kepala Biro Umum,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

}{ttd}

Didit Eko Setiawan

LAMPIRAN I PENGUMUMAN  
NOMOR : 23/KP.03/IX/2024  
TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2024

**JABATAN, JALUR FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH FORMASI DAN PENEMPATAN**

NO	JABATAN	JALUR FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	PENEMPATAN
1	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	23	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO UMUM, BAGIAN RUMAH TANGGA DAN LAYANAN PENGADAAN
2	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JALUR FORMASI</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>	<b>PENEMPATAN</b>
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	4	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JALUR FORMASI</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>	<b>PENEMPATAN</b>
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
12	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	S-1 PERTANIAN; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO UMUM, BAGIAN KEUANGAN
13	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 PENDIDIKAN	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA
14	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO UMUM, BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL, SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA



<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JALUR FORMASI</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>	<b>PENEMPATAN</b>
16	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	6	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO UMUM, BAGIAN RUMAH TANGGA DAN LAYANAN PENGADAAN
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA
19	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO UMUM, BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL, SUBBAGIAN ARSIP
20	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, SUBBAGIAN UMUM SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
21	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO UMUM, BAGIAN KEUANGAN

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JALUR FORMASI</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>	<b>PENEMPATAN</b>
22	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM
23	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KHUSUS	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
24	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KHUSUS	D-III TEKNIK MESIN; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA, D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN	3	SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
<b>TOTAL FORMASI</b>				<b>66</b>	

LAMPIRAN II PENGUMUMAN  
NOMOR : 23/KP.03/IX/2024  
TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR  
SIPIIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024

....., .... Oktober 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Komnas HAM  
di  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jabatan yang dilamar :  
Alamat Domisili :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah dengan ketentuan Pas Foto terbaru Pakaian Formal dengan Latar Belakang Merah;
2. Kartu Tanda Penduduk asli;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip nilai asli;
5. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai;
6. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi meterai;
7. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
8. Surat keterangan aktif bekerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia;

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

E-Meterai 10.000
---------------------

ttd\*

(Nama Pelamar)

(\* ttd tidak boleh mengenai E-meterai, namun apabila menggunakan meterai konvensional maka ttd harus di atas meterai

LAMPIRAN III PENGUMUMAN  
NOMOR : 23/KP.03/IX/2024  
TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR  
SIPIIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

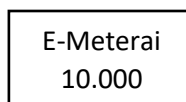
Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Ttd\*

(Nama Pelamar)

(\* ) ttd tidak boleh mengenai E-meterai, namun apabila menggunakan meterai konvensional maka ttd harus di atas meterai

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN  
NOMOR : 23/KP.03/IX/2024  
TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR  
SIPIIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024

>>> KOP SURAT<<<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai ..... yang relevan dengan jabatan yang dilamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Komisi nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 Selama..... Tahun ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal.....Dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

(Jabatan Penandatanganan)

Cap  
Instansi

ttd

(Nama penandatanganan)\*

(\* ) ttd Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN V PENGUMUMAN  
NOMOR : 23/KP.03/IX/2024  
TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR  
SIPIIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024

>>> KOP SURAT<<<<

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA SAAT MENDAFTAR  
PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG DILAMAR

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja/Instansi : .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Pendidikan : .....

Unit Kerja/Instansi : .....

Pada saat ini aktif bekerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Selama..... Tahun ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal..... secara berturut-turut dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

(Jabatan Penandatangan)

Cap  
Instansi

ttd

(Nama penandatangan)\*

(\*) ttd Kepala Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia